

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen



DISUSUN OLEH

FRUMENSIA YUSTA YASMIN

2019120075

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2023

RINGKASAN

Agar semua instansi dapat melakukan modifikasi yang diperlukan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di KPU Kota Malang dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi Standar Akuntansi yang Pemerintah masih memiliki institusi yang belum menerapkan dirinya secara maksimal hingga saat ini. Tujuan penelitian ini juga untuk mengkaji laporan keuangan yang disampaikan oleh KPU Kota Malang dengan menggunakan SAP. agar kajian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja KPU Kota (KPU) Laporan keuangan yang buruk.

Penelitian kualitatif adalah metodologi yang digunakan. Data observasi, informan, dan dokumentasi. Wawancara dengan ahli materi dan data laporan keuangan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang digunakan untuk mendapatkan informasi. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 ditindaklanjuti dalam pelaporan keuangan KPU Kota Malang Tahun 2021. Laporan keuangan yang disampaikan kepada KPU Kota Malang meliputi laporan operasional. Komponen laporan keuangan ini mendukung permasalahan sumber daya manusia yang masih ada di KPU Kota Malang berbasis akrual. Dalam rangka pengendalian penuh KPU Kota Malang tahun 2021 menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan SP2D.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan keuangan, Berbasis Akrual

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, baik di tingkat nasional maupun lokal, organisasi pemerintah dapat berkontribusi kepada masyarakat dengan menawarkan layanan yang berkaitan dengan spesialisasi khusus mereka. Organisasi pemerintahan memerlukan dana untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan tersebut.

Standar Akuntansi Federal kemajuan di sektor akuntansi yang didasarkan pada kerangka kerja yang kuat, sehingga memungkinkan untuk mendukung suatu aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung di suatu organisasi dan dapat melakukannya secara otomatis dengan produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Bidang akuntansi harus beradaptasi untuk mencapai tata kelola yang baik karena proses akuntansi dapat menyediakan data keuangan dalam bentuk laporan keuangan untuk banyak pihak.

Setiap organisasi pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah wajib mengadopsi SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) untuk membuat laporan keuangan. Keputusan ini dipandu oleh kebijakan pemerintah. Untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan dimaksudkan sebagai tolok ukur, acuan, dan standar, pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Metodologi akuntansi SAP digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sekaligus membangun keterbukaan dan akuntabilitas. Peraturan

standar akuntansi pemerintahan yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 untuk memasukkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Akibat pengesahan PP 71 Tahun 2010, PP 24 Tahun 2005 tidak berlaku lagi. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan disampaikan tepat waktu, karena pengelolaan keuangan negara harus transparan dan akuntabel. (Yustisia, 2007: 166). Setiap unit kerja wajib membuat laporan hasil kegiatan untuk menilai seberapa baik kegiatan dan fungsi yang dijalankan di unit tersebut.

Salah satu kementerian negara dan organisasi yang bertugas membuat laporan akuntansi dan meminta pertanggungjawaban departemen berdasarkan laporan keuangan adalah komisi pemilihan umum. Standar yang mengikat secara hukum dan landasan upaya peningkatan Standar pelaporan keuangan pemerintah Indonesia didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan merupakan suatu hubungan atau tolok ukur bagi pelaku usaha yang membocorkan informasi keuangan dalam artian jumlah substansi yang ada di dalam organisasi itu sendiri, menurut penelitian Fitria Setyaningrum (2013–2017).

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan pengeluaran yang direncanakan, transfer, realisasi pendapatan, dan pembiayaan anggaran untuk

menilai efektivitas dan efisiensi akun keuangan organisasi sesuai dengan persyaratan undang-undang.

Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pembuatan standar akuntansi laporan keuangan pemerintah harus diperluas seiring dengan volume laporan keuangan. Bagaimana laporan keuangan akuntansi pemerintah dibuat terkait dengan perubahan dari cash basis ke accrual basis. Mekanisme yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan lainnya ketika uang diterima atau dibayarkan dikenal sebagai dasar kas. Sedangkan basis akrual digunakan untuk mendokumentasikan basis ekonomi atau peristiwa lain yang catatannya disimpan pada saat terjadinya transaksi atau kejadian.

Basis akrual dalam neraca, seperti piutang atau kewajiban yang tidak tercatat, dimungkinkan ketika kegiatan laporan keuangan pemerintah, seperti pendapatan dan pengeluaran, yang muncul dalam laporan realisasi anggaran didokumentasikan. Laporan keuangan yang menggunakan metode transaksional untuk mencatat aset, piutang, dan utang perusahaan berbeda dengan yang menggunakan metode cash basis dan metode akrual. Organisasi Sektor Publik adalah semua organisasi negara yang mendapatkan pendanaan dari wajib pajak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang yang berfungsi sebagai alat pemerintah pusat.

Agar KPU Kota Malang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemerintah, maka KPU Kota Malang harus memberikan

laporan keuangan seperti neraca, tanggapan atas laporan keuangan, dan laporan realisasi anggaran (LAP).

Penulis akan mengkaji “ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG” berdasarkan uraian di atas.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang dijelaskan di atas, masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan di KPU Kota Malang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010”?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi kajiannya pada catatan keuangan KPU Kota Malang tahun 2021 agar lebih terarah, terarah, dan terbatas.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik implementasi standar akuntansi pemerintahan dan peraturan KPU Kota Malang Nomor 71 Tahun 2010 sesuai dengan gambaran permasalahan..

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Untuk lebih memahami bagaimana pemerintah menggunakan dasar akrual, khususnya bagi individu yang bekerja di Kementerian Negara dan Lembaga
- b. Belajar menyelidiki, menganalisis, dan memperhatikan fenomena masalah yang muncul.

2. Bagi Akademik

- a. Untuk memberikan informasi dan perspektif kepada siswa
- b. Sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut

3. Bagi Komisis Pemilihan Umum Kota Malang

Hasil penelitian ini harus menginformasikan dan menilai bagaimana basis akrual akan digunakan pada tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Putu Cita. 2020. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, Akuntansi Dan Keuangan. Universitas Hindu Indonesia.
- Dollah, K., Saerang, D. P. E., & Manossoh, H. (2017). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tomohon the Analysis Implementation of Accounting Standards Accrual Based in the City Government Tomohon. *Jurnal EMBA*, 223(1), 223–230.
- Fitria Setyaningrum, 2013, analisis kinerja keuangan perusahaan untuk mengevaluasi tingkat profitabilitas. Manajemen Ekonomi.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2009). Analisa Laporan Keuangan. <https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2011.09.004>.
- KSAP. 2011. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Accrual Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, 18 Februari.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1–8.
- Motoh, J. F., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado.
- Moleong, J. Lexy : Bandung, 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Niu, F. A. L., Karmoyo, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis penerapan PP. NO. 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamaibagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*,
- Ramadhan, P. R., & Alpi, M. F. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Seminar Nasional Taman Siswa Bima Tahun 2019*, (2018), 1–7.
- Sallipadang, C. (n.d.). KEUANGAN. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Trihani, I. (2019). Analisis Manfaat Basis Akrua dan Basis Kas Menuju Akrua Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Akuntansi Sektor Publik*, (1), 1–20.

Ummayyah, C., Sopanah, A., & ... (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Bakorwil Iii Malang.